

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN  
PADA SISTEM PESANAN DALAM JUAL BELI ISTISHNA  
(Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab.  
Lampung Utara)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah**

**Oleh :**

**Yulisa Safitri**

**NPM. 1521030304**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**TAHUN 1441/2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN  
PADA SISTEM PESANAN DALAM JUAL BELI ISTISHNA  
(Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab.  
Lampung Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah**

**Oleh :**

**YULISA SAFITRI  
NPM. 1521030304**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H  
Pembimbing II: Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1441/2019 M**

## ABSTRAK

Penundaan pembayaran berarti penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian. Dalam jual beli pesanan terdapat dua jenis. Salah satu jual beli pesanan yaitu jual beli *istishna'*. Jual beli *istishna'* ini terdapat pada Toko Cahay Aluminium Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Dalam sistem pembayaran dimana para pihak sudah mengetahui jelas harga barang tersebut. Sedangkan dalam hal pelunasan barang tersebut pihak pemesan sering menunda-nunda sisa pembayaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan kabupaten Lampung Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* pada toko cahaya aluminium kecamatan Kotabumi Selatan kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau responden. Data primer dikumpulkan melalui observasi, *interview*, dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum Islam, kemudian dipakai untuk menganalisis data yang dihasilkan dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan penundaan pembayaran dalam jual beli *istishna'* yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak sesuai dengan kesepakatan awal secara tertulis bahwa pemesan melunasi setelah barang telah selesai dibuat, pihak penjual harus dirugikan oleh pemesan dan penjual tertunda untuk membeli barang modal. Dari tinjauan hukum Islam penundaan pembayaran dalam jual beli *istihna'* yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemesan dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapatkan keuntungan yang didapat dari pembeli. Adanya penundaan pembayaran dari pihak pemesan menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha Toko Cahaya Aluminium.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulisa Safitri  
NPM : 1521030304  
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Agustus 2019  
Penulis



Yulisa Safitri  
NPM. 1521030304





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)

Nama : Yulisa Safitri

NPM : 1521030304

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H**

**NIP. 197208262003121002**

**NIP. 197111061998032005**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara), disusun oleh : Yulisa Safitri, NPM : 1521030304, Jurusan : Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah.

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua** : Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

**Sekretaris** : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

**Penguji I** : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.I

**Penguji II** : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Mengetahui

Fakultas Syari'ah



Dr. M. Kholilurruddin, M.H

NPM.10219930310002



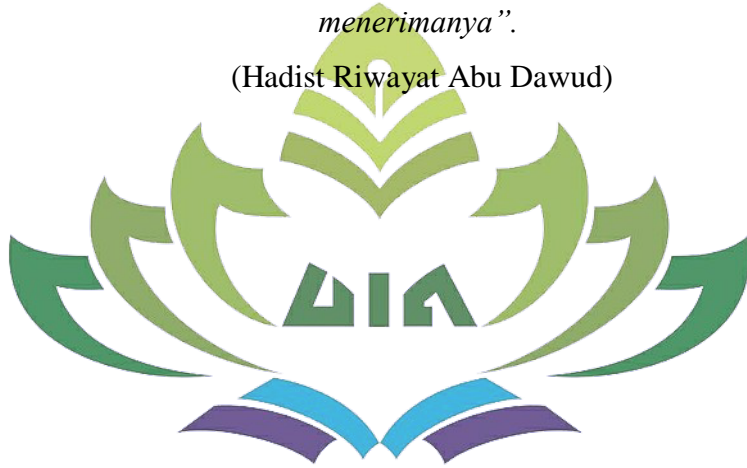
## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مَطْلَ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا تُتْبِعَ أَحَدُكُمْ

عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبِعْ (رواه البخاري ومسلم) ١

*“Dari Abu Hurairah r.a bahwa dari Rasulullah SAW bersabda: penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adaah penganiyaan (zalim), dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya maka hendaklah ia menerimanya”.*

(Hadist Riwayat Abu Dawud)



---

<sup>1</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, Da Al-ik, t.t., h. 27.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Ayah dan ibu ku tercinta, Bapak Wan Ali dan Ibu Listari, yang senantiasa selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan doanya disetiap sujudnya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu
2. Yang saya sayangi dan saya banggakan kakak Eka Nopialisa S.Pd, Oktavia Afrini S.Kom, Agung Gusti Randa S.Kom, serta adik saya Rahma Alia yang selalu mendukung baik itu materi ataupun spiritual, mendoakan serta mengajarkan penulis akan arti hidup untuk mencapai kesuksesan dan berkat inspirasi yang diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Sahabat-sahabatku Enila Sari S.H, Tri maulidiah S.H dan Sartika Tri Ramadini S.H yang selalu menemani disetiap proses dalam menuntut ilmu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta



## RIWAYAT HIDUP

Yulisa Safitri dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 27 juli 1994 yang merupakan anak ke empat dari lima bersaudara merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Wan Ali dan Ibu Listari adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak ditempuh di TK Islam Ibnu Rusyd di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2002
2. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Islam Ibnu Rusyd di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2009
3. Melanjutkan Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di MTS Negeri 1 Kotabumi, di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2012
4. Melanjutkan Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kotabumi, di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2015
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi IAIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA SISTEM PESANAN DALAM JUAL BELI ISTISHNA (STUDI PADA TOKO CAHAYA ALUMINIUM KEC. KOTABUMI SELATAN KAB. LAMPUNG UTARA) dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pegikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitankesulitan mahasiswa;
3. Dr. H. A. Kumedi ja’far, S.Ag., M.H dan Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua dan sekretaris jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;



4. Dr. H. A. Kumedi ja'far, S.Ag., M.H, selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Teman-teman seperjuangan Mu'amalah angkatan 2015 khususnya MU F 2015
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung; Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin

Bandar Lampung , Mei 2019

Penulis,

Yulisa Safitri  
NPM. 1521030304

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	16
1. Jual Beli <i>Istishna</i> ' .....	16
a. Pengertian Jual Beli <i>Istishna</i> ' .....	16
b. Dasar Hukum <i>Istishna</i> ' .....	22
c. Rukun Dan Syarat Jual Beli <i>Istishna</i> ' .....	27
d. Penetapan Waktu Penyerahan Dalam Jual Beli <i>Istishna</i> ' .....	35
e. Tujuan Jual Beli <i>Istishna</i> ' .....	36
f. Hak dan Kewajiban Pelaku <i>Istishna</i> ' .....	37
g. Berakhirnya Akad <i>Istishna</i> ' .....	38



h. Hikmah Disyariatkannya <i>Istishna'</i> .....	39
2. Penundaan Pembayaran Hutang .....	40
a. Pengertian Penundaan Pembayaran Hutang .....	40
b. Dasar Hukum Penundaan Pembayaran Hutang .....	41
c. Prinsip-Prinsip Penundaan Pembayaran Hutang .....	45
B. Tinjauan Pustaka.....	52

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek .....	57
1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan pada Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara .....	57
B. Deskripsi data penelitian .....	60
1. Sistem Pembayaran pada Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara ..	60
2. Pelaksanaan Penundaan Pembayaran pada Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara .....	61
3. Dampak Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli <i>Istishna'</i> pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara ..	64

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Temuan Penelitian .....	67
1. Analisis Pelaksanaan Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli <i>Istishna'</i> pada Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara .....	67
2. Analisis Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli <i>Istishna'</i> pada Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara .....	70

B. Pembahasan .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Rekomendasi .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	
Lampiran 2 Catatan Lapangan Hasil Wawancara	
Lampiran 3 Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen Lain)	
Lampiran 4 Hasil Analisis Data	





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka akan ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli *Istishna*’ (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara).

Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan, pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan. Kalau tidak diketahui persis maknanya<sup>2</sup>

Penundaan pembayaran adalah menunda-nunda waktu pembayaran yang telah disepakati oleh pihak pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli ataupun dalam melakukan pembayaran lainnya.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2.

yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>3</sup>

*Istishna'* merupakan salah satu bentuk dari jual beli *salam*, hanya obyek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Istishna'* di definisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuatbarang.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan skripsi ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli *istishna'* Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli *istishna'* (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara). Adalah sebagai berikut :

### **1. Alasan Objektif**

- a. Karena penundaan pembayaran dalam jual beli *istishna'* masih sering terjadi di antara penjual dan pembeli, sehingga penelitian ini dianggap perlu dan menulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

---

<sup>3</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

<sup>4</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005), h. 101.

- b. Karena fakta dilapangan tidak sesuai dengan syarat Isitishna, yaitu dimana dalam jual beli pesanan barang ini masih adanya penundaan pembayaran oleh pihak pembeli dan ketidakjelasan dalam pembayaran.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Di samping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang pelajari sebagai mahasiswa syaria'ah prodi muamalah.
- b. Tempat dan penelitian terjangkau oleh .

## C. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia ini adalah sebagai subyek hukum yang tidak mungkin hidup menyendiri saja, tanpa ada hubungan kekerabatan sama sekali dengan manusia lainnya yang ada di muka bumi. Manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Pergaulan hidup setiap orang melakukan hubungan ataupun kegiatannya sehari-hari dengan orang lain disebut muamalah.

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan

---

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2.

kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>6</sup> Allah sendiri berfirman dalam surah Al-Isra (17) ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing".Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.<sup>7</sup>

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Namun demikian, maka akan di bahas tentang jual beli secara pesanan, yakni jual beli *istishna'*. *Istishna'* merupakan salah satu bentuk akad ghairu musamma yang mirip dengan salam. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama jual beli pesanan dimana penyerahan barangnya ditangguhkan dan diserahkan kemudian. *Istishna'* berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli dan penjual dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dinyatakan.<sup>8</sup>

Ketentuan pembayaran pada *istishna'* adalah sebagai berikut, Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang

<sup>6</sup>NasrunHaroen, *FiqhMuamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. viii.

<sup>7</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010),h. 107.

<sup>8</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 52.



atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.<sup>9</sup>

Berdasarkan praktek lapangan yang terjadi di toko Cahaya aluminium Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara pelaksanaan jual beli perabot kaca dan aluminium dengan cara dipesan biasanya menunggu waktu beberapa minggu untuk membuat barang tersebut sampai barang yang dipesan benar-benar selesai dan dapat dikirim kepada pihak pemesan dan pembayaran harus dilunasi setelah pesanan selesai. Tetapi dalam pembayaran tidak sedikit pembeli yang belum melunasi ketika barang sudah selesai dikerjakan sebagaimana kesepakatan bersama.

Seperti yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara terdapat kegiatan jual pesanan perabot rumah tangga seperti lemari kaca, rak kaca, dan lainnya, jual beli *istishna'* ini dilakukan oleh dua orang yaitu antara penjual dan pembeli pesanan dimana penjual adalah pembuat perabot lemari kaca, rak kaca, dan lainnya dan pembeli adalah orang yang memesan barang. Penjual dan pembeli bersepakat bahwa ketika barang sudah diselesaikan cicilan harus selesai dilunasi. ketika sudah selesai barang dibuat, pemesan atau pembeli melakukan penundaan pembayaran dengan alasan pemesan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus tertunda untuk pembayarannya. pembeli bisa merugikan penjual karena menunda pembayaran dan telah melanggar kesepakatan awal yang sudah disepakati

---

<sup>9</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 359.

bersama dimana pembayaran sudah dilunasi ketika barang sudah diselesaikan oleh penjual, dalam hal ini salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Penundaan pembayaran ini bisa berisiko penipuan terhadap pihak penjual.

Penundaan pembayaran dalam sistem jual beli *istishna'* ini dapat merugikan penjual karena sudah menyelesaikan pembuatan yang telah ditentukan waktu penyelesaian bersama tetapi pembeli belum melunasi utangnya kepada penjual ketika barang atau pesanan sudah selesai dibuat. Jika sengaja memunda membayar hutang padahal mampu ini adalah kedzaliman. Seperti dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh shahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري ومسلم)<sup>10</sup>

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa dari Rasulullah SAW bersabda: penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah penganiyaan (zalim), dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya maka hendaklah ia menerimanya”. (Hadist Riwayat Abu Dawud)

Dalam pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* di Toko Cahaya Aluminium, salah satu syaratnya tidak terpenuhi yaitu tidak ada kejelasan waktu. akad atau perjanjian ini pembayarannya tidak dapat dilakukan langsung dan harus ditunda dari pihak pembeli atau penerima barang dan penjual harus menunggu

<sup>10</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, Da Al-ik, t.t., h. 27.

pembayaran dari pihak pemesan, baru setelah nantinya pihak pembeli atau pemesan membayar penjual barang yang sudah dibuat oleh pengrajin. Akan tetapi pihak pemesan atau penerima barang tidak menyebutkan waktu pembayaran dalam jual beli kepada penjual atau pembuat, sehingga penjual menunggu pembayaran yang ditunda dan tidak diketahui secara jelas waktunya.

Berdasarkan fenomena diatas, maka saya tertarik untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* yang dilakukan oleh pembeli di Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Dalam hal ini pelaksanaan yang terjadi masih sangat banyak di masyarakat tanpa mengetahui konsekuensinya, sehingga mengangkat judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli *Istishna'* (Studi pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara).**

#### **D. Fokus Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'*. Karena pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam keterbatasan waktu dan dana, penelitian ini akan difokuskan pada “penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'*

pada Toko Cahaya Aluminium Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara”.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam Jual Beli *Istishna'* pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran pada sistem dalam jual beli *istishna'* pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dalam skripsi di antaranya :

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara



- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

### G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'*, serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam.
- b. Secara praktis  
 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat baik yang melakukan transaksi maupun tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/ mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kualitatif. Dikarenakan metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, maka akan menggunakan identifikasi sebagai berikut :

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yang digunakan untuk cara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkecamuk sebagai bentuk gejala sosial. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada dipergustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

### b. Sifat penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya. Menganalisis apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita.

## 2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'*. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang di ambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya, sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia. Yang ambil di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran majalah) atau seseorang ,mendapat inforasi dari orang lain.

## 3. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki kateristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan di teliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah pemilik Toko Cahaya Aluminium 1 orang dan pembuat kaca aluminium yang berjumlah 3 orang

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian pokok dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Berdasarkan buku Dr. Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subyeknya kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, jika subyeknya lebih dari 100 orang maka diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.<sup>11</sup> Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, yaitu 4 orang maka penelitian ini adalah penelitian populasi. Oleh karena itu, sampel dalam populasi ini berjumlah 4 orang.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 80.

<sup>12</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 95.



b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>13</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Dalam metode pengolahan data ini menggunakan beberapa cara diantaranya :

a. Tahapan Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang masuk atau (*raw date*) terkumpul itu tidak logid dan meragukan, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah peneliti.

b. Tahapan Sistematika Data

Tahapan Sistematika Data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urusan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

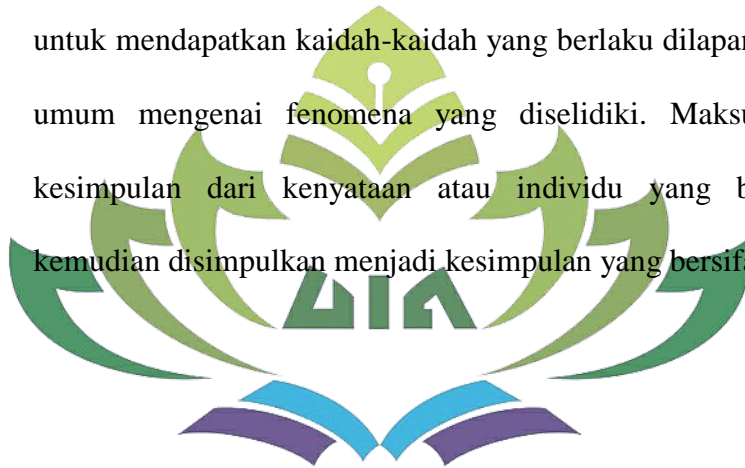
Dalam hal ini setelah melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data yang diperoleh baik data lapangan maupun kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,h. 124.

mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi dimasyarakat terkait dengan pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'*. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan ilmu serta pemahaman mengenai penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* menurut hukum Islam.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Maksudnya menarik kesimpulan dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Jual Beli *Istishna'*

##### a. Pengertian jual beli *istishna'*

Secara bahasa, kata *istishna'* diambil dari kata *Shana'a* yang berarti membuat yang kemudian lalu ditambahkan huruf *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *istishna'*. Yang berarti meminta untuk dibuatkan/ dipesan sesuatu.<sup>1</sup>

Secara terminologi *Istishna'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna'* juga dapat diartikan sebagai akad yang dibuat seseorang untuk membeli barang pada orang tersebut. Jadi, dalam akad *Istishna'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya.<sup>2</sup>

Menurut ahli fikih, pengertian *Istishna'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang).<sup>3</sup>

*Istishna'* ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai

---

<sup>1</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 40.

<sup>2</sup>Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 94.

<sup>3</sup>Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al Adalah*, Vol. XII, No. 4 2015, (Bandar Lampung Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 788 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2203> (23 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya, akad *Istishna'* sama halnya dengan *salam*, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad *Istishna'* tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual.<sup>4</sup>

Pengertian *Istishna'* menurut istilah tidak jauh berbeda dengan menurut bahasa Wahbah Zuhaili mengemukakan *Istishna'* adalah:

“*Istishna* adalah akad di mana seseorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut”<sup>5</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.<sup>6</sup>

Pendapat lain mengatakan, *Istishna'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Para ulama menilai bahwa akad *Istishna'* termasuk dalam akad jual beli, bukan akad upah mengupah atau sewa menyewa jasa (*ijarah*). *Jumhur* ulama memandang akad ini

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 95.

<sup>5</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 101.

<sup>6</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. I, h.



akad *salam* (jual beli pesanan), sehingga syarat-syaratnya pun sama dengan syarat yang berlaku dalam jual beli *salam*. Semua barang yang sudah dipesan oleh penerima barang harus diberikan pada waktu akad disepakati dan pada waktu penyerahan harus jelas barangnya. Jadi dalam *Istishna'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Adapaun bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut adalah barang milik pembuatnya, apabila bahan dasarnya dari orang yang memesan maka akadnya bukan *Istishna'* tetapi akad *ijarah*.<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas *Istishna'* adalah akad antara dua orang di mana salah seorang *mustashni'* (pemesan) minta dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu kepada pembuatnya (*shani'*).<sup>8</sup>

Akad *istishna* terdapat dua jenis, yakni :

a) Akad *Istishna'*

*Istishna'* adalah akad jual beli yang berbentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu dalam pembuatan barang yang telah disepakati bersama antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*). Menurut hukum Islam *istishna'* merupakan bentuk transaksi pembiayaan yang berprinsip pada syariah. Akad *istishna'* ini pembuatan barang melalui seseorang untuk dibuatkan barang atau membeli barang tersebut sesuai

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 146.

<sup>8</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 101

dengan spesifikasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan akan menjual barang tersebut kepada pembeli akhir. Penjual dan pembeli sepakat dengan harga yang ditetapkan dan sistem pembayaran, sistem pembayaran tersebut bisa dilakukan dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai dengan waktu yang akan datang.<sup>9</sup> lain dengan halnya produsen untuk dibuatkan atau menyediakan barang pesanan. Dengan demikian penjual berperan sebagai pembeli, yaitu dimana pihak penjual memesan barang dari pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna'*. Akad antara produsen (yang menyediakan barang pesanan) dan penjual berpisah dari akad pertama antara penjual dan pembeli akhir. Akad kedua akan sah, apabila akad pertama telah dilakukan atau sah. Apabila antara penjual dan produsen (yang menyediakan barang pesanan) selesai menyelesaikan barang atau akad, maka baru akan dilakukan akad ketiga yaitu sebagai penjual pesanan kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati antara pembeli dan penjual dan dengan harga yang telah disepakati.<sup>10</sup>

Jual beli dengan tempo pembayaran diperbolehkan secara syar'i sebagaimana diperbolehkan jual beli dengan cara pembayaran kontan, jual beli dengan cara pembayaran ditangguhkan hal ini diperbolehkan oleh Nabi Rasulullah "barang siapa yang berutang

---

<sup>9</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2004), h. 65.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

dengan kurma maka hutangnya tersebut harus jelas tukarannya, jelas timbangannya dan jelas tempo pembayarannya. Nabi Muhammad SAW juga pernah membeli makanan dari seseorang yang non muslim dan beliau lalu menjadikan baju besinya sebagai jaminan.<sup>11</sup> Jika tempo waktu yang ditentukan tidak diketahui maka jual beli tersebut menjadi tidak sah karena tidak adanya kejelasan dalam hal ini bisa mengembangkan kelancaran pembayaran menjadi sesuai tuntutan akad. Hal tersebut dapat terjadi karena penjual berhak atas pembayaran yang diberikan pihak pembeli, penjual akan menuntut pelaksanaan pembayaran tersebut secepat mungkin. Sebaliknya pembeli akan menunda pembayaran selama mungkin. Hal ini akan dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk mensyaratkan pembatasan tempo waktu pembayaran. Apabila pihak pembeli menyepakati ketetapan pembayaran tetap, boleh asalkan pihak penjual meridhainya.<sup>12</sup>

b) *Istishna'* Paralel

*Istishna'* paralel adalah suatu penjelasan dari bentuk akad *Istishna'* antara pembuat dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajiban dari penjual kepada pemesan, penjual melakukan akad *Istishna'* dengan pihak lain (sub kontraktor) yang dapat memenuhi

---

<sup>11</sup>Ahmad Asy-Syarbashi, Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan, (Jakarta: Lentera, 2006), cet. Ke-2, h. 187.

<sup>12</sup>*Ibid.*,

segala yang dipesan pembeli. Dimana akad *Istishna'* yang pertama tidak bergantung pada *Istishna'* kedua.<sup>13</sup> *Istishna Paralel* banyak digunakan atau diaplikasikan pada perbankan seperti bank Islam. Ada konsekuensi bank Islam saat menggunakan *istishna paralel* yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Bank Islam yaitu sebagai pembuat kontrak pertama tetap satu-satunya pihak yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban dari *istishna paralel* atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Oleh karena itu, bank Islam sebagai *sahni'* pada kontrak pertama, bank sepenuhnya tetap bertanggungjawab akan setiap kelalaian, pelanggaran, amupun kesalahan kontrak yang bersal dari kontrak paralel.
- 2) Penerima sub kontrak dari pembuatan paralel bertanggung jawab akan bank Islam sebagai pihak pemesan. Bank Islam dengan pembeli tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung pada kontrak pertama akad jual beli *istishna'*. jual beli *istishna'* kedua ialah kontrak paralel, tetapi bukan bagian ataupun syarat dari kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitannya dengan hukum.
- 3) Bank Islam sebagai *shani'* maupun pihak yang siap untuk mengadakan maupun membuat barang, akan bertanggungjawab

---

<sup>13</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : GemaInsani, 2001), h.159

<sup>14</sup> Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah Revisi*, (Jakarta: LPFEusakti, 2006), h. 182-183.

atas pelaksanaan sub kontrak kepada pembeli atas kesalahan dan jaminan yang akan timbul darinya. Kewajiban ini yang akan memberi kebebasan *istishna' paralel* juga menjadi kebolehan untuk memungut keuntungan bagi pihak bank.

Jual beli dengan menggunakan *istishna paralel* salah satu bentuk pekerjaan yang juga dianjurkan oleh Islam karena para ulama mendefinisikan muamalah yaitu akad yang memperbolehkan manusia untuk menukar manfaat.

b. Dasar Hukum Istishna

Jual beli *istishna'* menyamai pada jual beli *as-salam* dimana sama-sama memberikan uang terlebih dahulu, maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada jual beli *as-salam* juga berlaku pada jual beli pesanan/ *istishna'*.

Jual beli pesanan seperti ini di syari'atkan dalam Islam berdasarkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah, 2:282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”<sup>15</sup>

Ayat di atas menjelaskan hukum mubahnya dan dalam tata administrasi perlunya ada catatan berupa buku-buku atau kwitansi lainnya yang di perlukan untuk ketertiban dan terjaminnya lupa atau

<sup>15</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma. T. th), h. 70



perbuatan penipuan, dan sebaiknya waktu pembayaran harus ditentukan waktunya dalam jual beli.<sup>16</sup>

Jual beli *istishna'* terdapat juga dalam firman Allah SWT surat An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>17</sup>

Landasan hukum pensyariatan akad *istishna'* didasarkan pada hadis Nabi SAW. Diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memesan cincin dari perak agar dibuatkan. Seperti yang dijelaskan pada hadis riwayat Muslim di bawah ini:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْفِضَةً قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (رواه مسلم)<sup>18</sup>

Artinya:Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka

<sup>16</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet Ke 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 415.

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid II*, (Yogyakarta: PT: Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 159.

<sup>18</sup>Al-Im Abli Al-Husain Muslim bi Al-Ajjaj Al-Qasyairi Al-Naisabury, *Shahih Muslim*,(Kairo: Dar Alifendi, 1997 M/1418 H), h. 522.

beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. (HR. Muslim)

Dalam hadist lain juga dielaskan:

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ  
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ أَنْ مُرِيَ  
غُلَامَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ  
يَعْمَلُهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ (رواه البخاري)<sup>19</sup>

Artinya: Dari Abu Hazim, ia berkata ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bin Sa'ad menanyakan tentang mimbar lalu ia menjawab: Rasulullah saw mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama oleh Sahal, "Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku duduk di atasnya ketika saya nasehat pada manusia." Maka aku memerintahkan padanya untuk membuatkan dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya pada Rasulullah saw. Maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk di atasnya. (HR Bukhari).

Perbuatan nabi Muhammad SAW ini merupakan salah satu pedoman bahwasanya akad dalam pemesanan itu diperbolehkan dalam hukum Dagang Islam. Selain dari pada pendapat para ahli fiqh dalam

<sup>19</sup>Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Abu suhaib karmi, (Saudi Arabia, Baitul afkar dauilyah linnasri, 1419 H/ 1998 M), hadis ke 2094, h. 395.

kaidah fiqh yang “semua ushul itu halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>20</sup>

Menurut jumhur fuqah jual beli *istishna'* merupakan suatu jenis khusus yang sama dengan jual beli *salam*. dengan demikian, ketentuan jual beli *istishna'* mengikuti aturan-aturan pada jual beli *salam*. Namun demikian, para ulama membahas lebih lanjut jual beli *Istishna'* dengan pemaparan sebagai berikut :

Menurut mazhab hanafi, jual beli *Istishna'* termasuk akad yang dilarang karna bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh orang penjual, sedangkan dalam *Istishna'*, pokok kontrak ini belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar istihsan karena dasar berikut.<sup>21</sup>

- a) Masyarakat telah mempraktekkan *istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa keberatan sama sekali. Hal ini menjadikan *istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau consensus secara umum.
- b) Dalam Islam dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijma'* ulama.

---

<sup>20</sup>Hasanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 9.

<sup>21</sup>Muhammad Syafi' Antoni, *Op.Cit.*, h. 114.

- c) Keberadaan Jual beli *Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang membutuhkan barang yang tidak ada di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- d) Jual beli *istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak salam tidak bertentangan dengan nash aturan Islam.

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *Istishna'* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *Istishna'*. Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut yang telah dikeluarkan sampai saat ini adalah:<sup>22</sup>

- a) No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*.
- b) No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli *Istishna* Paralel.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qiyas dan kaidah-kaidah umum tidak memperbolehkan *Istishna'*. Karena *Istishna'* merupakan jual barang yang belum ada. Sementara jual beli semacam ini dilarang oleh Rasulullah SAW, karena barang yang menjadi objek jual beli tidak ada atau belum ada pada waktu akad. Selain itu, juga tidak bisa dikatakan *Ijarah*, karena bahan yang akan digunakan untuk membuat barang adalah milik sipenjual atau *shani'*. Hanya saja, bila berlandaskan pada *istishsan*, ulama Hanafiyyah memperbolehkan. Karena akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilaksanakan

---


<sup>22</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 258.

oleh hampir seluruh masyarakat. Bahkan telah disepakati (*ijma'*) tanpa ada yang mengingkari. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa *Istishna'* diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad *salam*, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada.<sup>23</sup>

Transaksi *istishna'* ini hukumnya boleh dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.<sup>24</sup>

c. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna'*

1) Rukun Jual Beli *Istishna'*



Transaksi jual beli *istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad jual beli *as-salam*. ketentuan jual beli *istishna'* mengikuti aturan akad dan ketentuan jual beli *as-salam*. Maka dari pada itu, pelaksanaan jual beli *istishna'* harus memenuhi sejumlah rukun, yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. *Muslam* atau Pembeli, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan yang memesan barang.
- b. *Muslam Alaih* atau Penjual adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- c. Objek akad, yaitu Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, ciri-ciri dan ukuranya. Syarat

---

<sup>23</sup>*Op.Cit.*, h. 95

<sup>24</sup>Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 26.

<sup>25</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, edisi I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 256.



barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status tanggungan, kriteria barang tersebut menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui dengan jelas.<sup>26</sup>

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad berikut ini:

- a) Barang (*mashnu'*) harus ada ketika akad

Barang tidak sah dijadikan objek akad apabila barang tersebut tidak ada ketika akad seperti jual beli yang sesuatu yang belum matang dipohon atau menjual sesuatu yang masih didalam tanah. Ada beberapa hal syara' yang membolehkan jual beli atas barang yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon setelah tampak matang buahnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>27</sup>

- b) Sesuai dengan ketentuan syara

Ulama fiqh berpendapat bahwa barang yang akan menjadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara'. Barang tersebut menjadi haram apabila dipandang tidak sah akadnya.

<sup>26</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj Nor Hasanudin*, (Jakarta: Pena Pundi Akasra, 2007), h. 169.

<sup>27</sup>Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2006), hlm. 168.

c) Dapat diberikan waktu akad

Ahli fiqh bersepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahterima ketika sudah ada akad. Yang tidak diserahkan ketika akad seperti jual beli burung yang masih ada di udara tidak di pandang sebagai akad.

d) *Ma'qud 'Alaih* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akad

Ulama fiqh menetapkan bahwa *ma'qud 'alaih* kedua belah pihak harus mengetahui jelas akadnya. jual beli *gharar*, dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang berakad adalah larang sunnah.

e) *Ma'qud 'Alaih* harus suci

Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qud alaih* harus suci tidak najis dan tidak mutanajis. Dengan kata lain *ma'qud 'alaih* yang dijadikan akad ialah segala sesuatu yang bersih atai suci, yang dapat dimanfaatkan menurut syara'.<sup>28</sup>

d. *Sighat* yaitu ijab dan qabul,<sup>29</sup> ijab adalah perkataan dari pihak pemesan yang meminta dibuatkan kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu barang kepadanya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan

<sup>28</sup>Syafi'i Rahmat, *Op. Cit.*, h. 61.

<sup>29</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.

untuk memberikan pernyataan persetujuannya atas hak dan kewajibannya tersebut.

Para ulama menetapkan adanya tiga ketentuan dalam *sighat* (ijab dan qabul), yaitu:<sup>30</sup>

- a) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga di pahami oleh pihak yang melakukan akad.
- b) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- c) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Segala macam ketentuan akad dan serah terima, merupakan dari jiwa yang harus merelakan dalam menyerahkan suatu barang tersebut yang masing-masing melakukan transaksi. Dengan demikian ijab merupakan suatu penyerahan barang, walaupun tanpa ada kalimat penyerahan, dan sebaliknya penerimaan barang itulah qabulnya, walaupun tanpa kalimat yang diucapkan.

*Maudhu akad* adalah yang utama disyariatkannya *maudhu akad* hakikatnya maksudnya dengan satu arti yaitu asli akad dan hukum akad. Namun pada asli akad di paparkan sebelum terujudnya akad, hukumnya dilihat dari peristiwa setelah

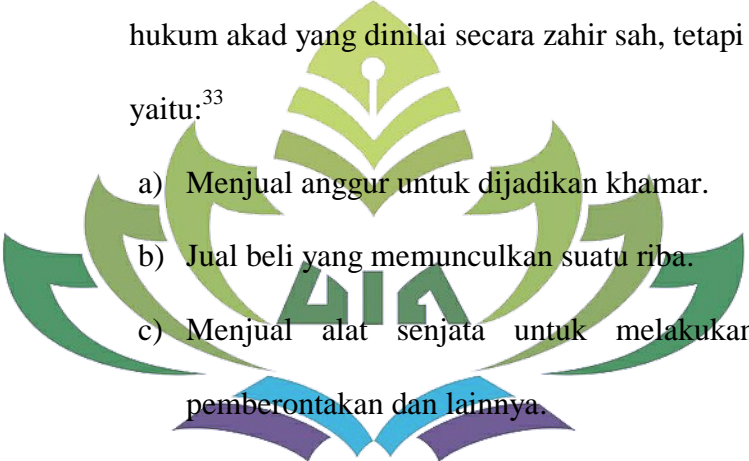
---

<sup>30</sup>Syafi'I Rahmat, *Op.Cit.*, h. 52.

terjadinya akad. Sedangkan *maudhu akad* berada di antara keduanya.<sup>31</sup>

Hal ini sangat berkaitan erat antara hubungan batinnya dan dzahir akad. Para ulama, ada yang menjelaskan bahwa antara zahir dan batin akad harus saling bersesuaian. Akan tetapi ada sebagian para ulama lainnya tidak mempermasalahkan masalah batin atau tujuan akad.<sup>32</sup>

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara zahir sah, tetapi makruh tahrim yaitu:<sup>33</sup>

- 
- a) Menjual anggur untuk dijadikan khamar.
  - b) Jual beli yang memunculkan suatu riba.
  - c) Menjual alat senjata untuk melakukan fitnah atau pemberontakan dan lainnya.

Adapun para ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syiah yang mempermasalahkan masalah batin akad, para ulama berpendapat bahwa akad tidak hanya dilihat dari sisi dzahirnya saja, tetapi juga batin. Dengan demikian, tujuan memandang akad dengan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan ketentuan syara' dianggap batal.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h.55

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 57

<sup>33</sup>Sahrawadi. K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h, 128

<sup>34</sup>Syafi'I Rahmat, *Op. Cit.*, h. 58.

Ketentuan dalam pembayaran jual beli *istishna* yaitu:<sup>35</sup>

a) Alat pembayaran harus diketahui bentuk dan jumlahnya, yaitu berupa barang, uang, atau manfaat, demikian juga cara pembayaran.

b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

c) Harga tidak boleh berubah apabila sudah ditetapkan.

Apabila setelah melakukan tanda tangan akad pemesanan mengubah bentuk barang maka terdapat penambahan biaya akibat perubahan ini maka itu menjadi tanggung jawab.

d) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.

Ketentuan tentang barang yaitu:<sup>36</sup>

a) Harus jelas spesifikasi ciri-ciri barang tersebut dan dapat diakui sebagai hutang.

b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

c) Penyerahannya dilakukan kemudian.

d) Tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

e) Barang yang sudah dipesan dan belum diterima tidak boleh diperjualbelikan

f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

<sup>35</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 48.

<sup>36</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Tentang Jual Beli Salam*, (Jakarta, 04 april 2000M)



- g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Berkaitan dengan syarat *istishna'*, kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar *istishna'* sah. Tiga syarat ini apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad *istishna'* dianggap rusak atau batal.<sup>37</sup>

- a) Barang yang menjadi objek *istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar dan sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan suatu barang, harus dijelaskan spesifikasinya bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, kualitasnya serta hal-hal yang terkait dengan barang tersebut. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.
- b) Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan seperti pakaian, perabot rumah, furniture, dan sebagainya.
- c) Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila

---

<sup>37</sup>Imam Mustafa, *Op. Cit.*, h. 96.

waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad *salam*.

Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanam, karena jika akad tersebut dibatasi dengan tenggang waktu tertentu, menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad Abu Hasan Asy-Syaibani, keduanya Abu Hanifah, menyatakan syarat tenggang waktu ini diperbolehkan saja disepakati kedua belah pihak, diperbolehkan juga akad ini tanpa tenggang waktu.<sup>38</sup>

Salah satu syarat yang paling penting pada akad *istishna'* adalah pada bahan mentah (*raw material*). Dari barang pesanan tersebut harus disediakan sendiri oleh pembuat (*shani'*). Apabila bahan mentahnya berasal dari *mustashni'*, perjanjian ini tidak bisa disebut akad *istishna'* tetapi menjadi akad *ijarah*. Apabila barang pesanan tersebut sudah jadi, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh *mustashni'* maka *mustashni'* boleh menolak untuk menerima barang tersebut dan *shani'* harus menggantikannya dengan barang yang sesuai yang telah ditentukan oleh *mustashni'* sebelumnya.<sup>39</sup>

Apabila rukun dan syarat semuanya telah dipenuhi, maka jual beli *Istishna'* ini dinyatakan sah dan masing-masing

---

<sup>38</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 142-143

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 47.

kedua belah pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati.<sup>40</sup>

Sifat akad *istishna'*, terdapat perbedaan pada pendapat ulama dalam hal menentukan sifat *istishna'*, dikalangan ulama mazhab hanafi terdapat dua pendapat, yaitu akad *istishna'* itu tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk mengundurkan diri dari akad *istishna'*.<sup>41</sup> Akan tetapi, imam abu yusuf dan ibn abidin (1784-1836) keduanya ahli *fiqh* mazhab hanafi, berpendapat bahwa akad *istishna'* bersifat mengikat. Bila telah jatuh tempo penyerahan barang, dan produsen berhasil membuat barang sesuai dengan pesanan, tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya. *Jumhur* ulama yang memasukkan *istishna'* ke dalam kategori jual beli *salam* menyatakan bahwa akad *istishna'* bersifat mengikat kedua belah pihak.<sup>42</sup>

d. Penetapan waktu penyerahan dalam jual beli *istishna'*

Akad jual beli *istishna'* dalam penetapan penyerahan tertentu tidak merupakan keharusan. Apabila waktu di tentukan, menurut Imam Abu Yusuf, syarat ini tidak diperlukan. Menurutnya *istishna'* merupakan hukumnya yang sah. Baik waktunya itu ditentukan maupun tidak.

---

<sup>40</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)., h. 146

<sup>41</sup>Rozalinda., *Op.Cit.*, h. 105

<sup>42</sup>Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.*, h. 145

Karena menurut adat kebiasaan, dalam penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam melakukan akad *istishna'*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, akad akan merubah menjadi akad *salam* seperti penyerahan dalam alat pembayaran di majlis akad akad.<sup>43</sup>

Pembeli memiliki pilihan saat melihat barang yang diperjualbelikan untuk mengambilnya dengan harga utuh atau membatalkan akad tersebut dengan khyar ru'yah (pengalihan) baik ia mendapatkan barang tersebut dengan kondisi yang sebagaimana telah dia deksprisikan sebelumnya maupun tidak, ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah dan Muhammad, sementara itu menurut Abu Yusuf menjelaskan “apabila dia mendapati sesuai dengan sebagaimana yang telah dideskripsikan maka dia tidak memiliki khiyar, demi menghindarkan kerugian dari penjualnya karena dengan begitu bisa jadi orang lain tersebut tidak akan mau membeli barang penjual yang dibuat tersebut dengan harga yang diberikan.”<sup>44</sup>

e. Tujuan jual beli *Istishna'*

Dengan keidzinan syara' dalam melakukan salam, maka tujuan jual beli *istishna'* yaitu adanya keuntungan bagi kedua pihak dimana saling tolong menolong diantara kedua beah pihak yang menguntungkan, yaitu dimana para pihak pemesan barang tersebut dapat memesan barang tersebut dengan bayaran yang dilakukan secara berangsur dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak selama tidak ada

---

<sup>43</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h. 4.

<sup>44</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 255.

yang merasa terbebani atau memberatkan. Adapun tujuan hukum Islam yang diperoleh dari transaksi muamalah tersebut yakni, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>45</sup>

f. Hak dan Kewajiban Pelaku *Istishna'*

- a) Pihak pertama dalam hal ini penjual menyetujui untuk mengganti rugi kepada pihak kedua dalam hal ini pembeli atas segala kerugian apabila terdapat kerusakan pada pesanan barang sebagai keteledoran dari pihak penjual.
- b) Pihak kedua dalam hal ini pembeli atau penerima pesanan wajib dan menyetujui untuk melakukan pembayaran angsuran secara bertahap kepada pihak pertama dalam hal ini penjual atau pembuat barang untuk membayar cicilan sesuai kesepakatan bersama, misalnya sebesar Rp. 750.000/minggu selama tiga bulan.
- c) Pihak pemesan mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari pembuat barang yaitu:
  - a) Penyerahan barang pesanan sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang telah ditetapkan.
  - b) Jumlah yang telah dibayarkan.

---

<sup>45</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, edisi VI (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 61.



g. Berakhirnya Akad *Istishna'*

Kontrak *istishna'* bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

- a) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak.
- b) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- c) Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak bisa menuntut pembatalannya.<sup>46</sup>

Mekanisme pembayaran transaksi *istishna'* yang telah dapat dalam akad dilakukan dengan tiga cara, yakni :<sup>47</sup>

a) Pembayaran dimuka secara keseluruhan

Proses ini merupakan pembayaran dengan keseluruhan harga barang pada saat dilakukan akad sebelum aktivitas pesanan yang dipesan oleh pihak pembeli atau penerima pesanan pada pembeliana akhir. Cara pembayaran seperti ini sama halnya dengan pembayaran dalam transaksi *salam*.

b) Pembayaran setelah menyelesaikan barang

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada pembuat pesanan setelah barang yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir, baik pembayaran secara keseluruhan maupun pembayaran

<sup>46</sup> <http://nadiranasyiffa.blogspot.com/2011/12/akad-istishna.html>

<sup>47</sup> Rifqi Muhammad, *akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 231-232

secara angsuran. Cara pembayaran *Istishna'* seperti ini sama dengan cara pembayaran transaksi murabahah.

c) Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan dilakukan bertahap atau secara angsuran selama dalam proses pembuatan barang pesanan. Mengenai cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa cara sesuai dengan perkembangan proses pembuatan barang pesanan.

h. Hikmah disyariatkannya *Istishna'*

Barang-barang produksi yang sudah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini ketika produk-produk itu juga meningkat sehingga harus menciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Dalam kondisi seperti ini, pihak produsen mendapat keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan dan selera baik dari segi bentuk dan kualitasnya. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama memperoleh kemashlahatan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Rozalinda, *Op. Cit.*, h.123

## 1. Penundaan Pembayaran Hutang

### a. Pengertian penundaan pembayaran hutang

Penundaan pembayarana adalah penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian.<sup>49</sup>

Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda nunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

Penundaan pembayaran ini sudah termasuk kedalam hutang yang harus dibayar. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang berhak dihibah dan dimasukkan kedalam penjara. Karena menunda-nunda pembayaran hutang adalah termasuk kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman tersebut karena orang tersebut telah mampu membayar hutang tetapi malah menyengaja untuk mengulur-ngulur pembayarannya.

Apabila seseorang mampu membayar hutang maka diharamkan baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh tempo. Oleh karena itu, barangsiapa memiliki hutang, maka hendaklah dia segera membayar hak orang-orang yang wajib dia tunaikan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT dalam hal tersebut sebelum maut menjemputnya dengan tiba-tiba, sementara dia masih tergantung

---

<sup>49</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.

pada hutangnya. Sebab yang namanya hutang adalah kewajiban yang harus disegerakan, mengalahkan dari berbagai kewajiban yang lain.<sup>50</sup>

b. Dasar hukum penundaan pembayaran hutang

Bagi orang yang mampu membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَرٍّ فَجَاءَتْهُ إِبِلُ

الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرٍّ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا

خَيْرًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً<sup>51</sup>

Artinya: Dari Abu Rafi' ia berkata: "Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: "Saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahu" Nabi kemudian bersabda: "Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang." (HR. Muslim)

Bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.<sup>52</sup>

<sup>50</sup><http://ahmadyasinnata7.blogspot.com/2015/02/hadist-menunda-pembayaran-hutang.html>, (20 mei 2019)

<sup>51</sup> *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi), jil. 3, h. 1224.

<sup>52</sup> A. Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 127

Hukum menunda pembayaran hutang dapat di bagi menjadi 2, yaitu:

- a) Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo.<sup>53</sup>

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مَطْلَ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ  
وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ<sup>54</sup>

Artinya: Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman, maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (Hadits riwayat Abu Dawud).

Apabila menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan seperti hadits diatas maka hukumnya merupakan haram bagi yang berhutang termasuk mampu dan merupakan dosa besar baginya.

Berdasarkan hadits diatas Rasulullah Saw. Memberikan perintah kepada orang yang memberikan hutang, apabila orang tersebut yaitu yang berhutang ada dalam masalah kesulitan dan tidak mampu untuk melunasi, maka seseorang yang memberikan hutang tersebut di anjurkan untuk memberi waktu kelonggaran

<sup>53</sup> <http://www.fikihkontemporer.com/2013/12/hukum-menunda-nunda-pembayaran-hutang.html>

<sup>54</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, Da Al-ik, t. t., h. 27.

kepada yang berhutang dengan menunggu sampai ia mampu untuk melunasi atau membayar hutang-hutangnya.

Apabila ada seseorang yang mampu (kaya) maka dapat pula menghiwalahkan kepada orang yang mampu untuk membayarnya, maka dia harus menerima hiwalah tersebut, dan selanjutnya hendaklah dia menagih uangnya kepada orang yang sudah diberikan hiwalah. Dengan begitu orang yang memberi hutang dapat mendapatkan haknya yaitu dapat dibayar dan dapat terpenuhi atas hutang-hutang tersebut.

Hiwalah hukumnya boleh (mubah), dengan syarat tidak ada unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Transaksi dalam bentuk hiwalah ini dalam praktiknya sekarang ini bisa berwujud seperti pengiriman uang melalui pos atau bank.<sup>55</sup>

- b) Hukum menunda pembayaran adalah mubah, apabila orang tersebut benar-benar belum mampu untuk melunasi barang atau uang tersebut atau dia mempunyai halangan untuk membayarnya padahal dia mampu membayarnya misalnya uang tersebut masih belum dimilikinya atau belum berada ditangannya atau hal-hal lainnya yang sudah dibenarakan dalam agama seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah (2) ayat 280 yaitu:

---

<sup>55</sup> A. Kumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 129



وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:”jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>56</sup>

Dan juga yang dijelaskan dalam Hadist Nabi Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،  
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ  
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)<sup>57</sup>

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW telah bersabda: “Barang siapa membantu salah satu mukmin dari suatu kesukaran didunia, maka Allah SWT akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulian, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim”.

<sup>56</sup>Dpeartemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbitt Diponegoro, 2006).

<sup>57</sup>Al-‘Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Riyad: Dar Athlas, 2000), juz 2, hlm. 208.

Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu termasuk dosa besar dan pelakunya menjadi fasiq karenanya. Ada perbedaan pendapat tentang kefasiqan ini, yaitu apakah fasiq itu jatuh sebelum penagih hutang atau menjadi fasiq dengan sendirinya karena penundaan. Jika penghutang sengaja menunda pembayaran setelah jatuh tempo, maka dia menjadi fasiq sebelum penagihan hutang itu, dan apabila penghutang sengaja menunda pembayaran setelah orang yang berpihutang itu menagih, maka dia menjadi fasiq pada saat penagihan, dan apabila penghutang memang benar-benar sengaja berniat dari awal akan menunda pembayaran tersebut, maka ia akan menjadi fasiq dengan sendirinya.<sup>58</sup>

#### c. Prinsip-prinsip penundaan pembayaran hutang

Dalam melakukan pembayaran antara kedua belah pihak, tidak boleh mendatangkan kerugian yang dilarang. Baik transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga. Adapun prinsip-prinsip yang perlu di perhatikan adalah :

##### a) Prinsip ridha

Prinsip saling ridha diantara para pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini tidak adanya unsur *Tadlis* (penipuan) baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu

<sup>58</sup><http://ahmadyasinnata7.blogspot.com/2015/02/hadist-menunda-pembayaran-hutang.html>

penyerahan.<sup>59</sup> Bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan. Kerelaan dalam melakukan suatu bentuk muamalah maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dalam bentuk muamalat lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT, pada surat An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>60</sup>

Dalam jual beli Allah SWT telah menganjurkan bahwa transaksi jual beli ini agar menjadi kriteria transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak.

#### b) Prinsip kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*) bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para

<sup>59</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 31

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Quran), h. 83

pihak yang berakad.<sup>61</sup> Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar (39) ayat 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya:“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”.<sup>62</sup>

#### c) Prinsip keadilan

Adil merupakan norma yang paling utama dalam segala aspek perekonomian. Berbeda dengan adil kebalikannya adalah zalim. Sifat yang dilarang oleh Allah SWT pada dirinya. Allah sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil dan sangat memusuhi sikap zalim.<sup>63</sup> Dalam prinsip keadilan ini dijelaskan dalam surah An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>61</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 83.

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Quran), h. 464

<sup>63</sup>RahmatSyafe'i, *Op., Cit*, h. 75.

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”<sup>64</sup>

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun. Kaitan antara keadilan dengan hidup manusia tak lain guna menciptakan satu harmoni kehidupan yang berjalan sesuai dengan hukum alam yang telah digariskan oleh Allah SWT atau yang sering kita sebut dengan sunnatullah.

d) Prinsip tolong menolong

Jual beli merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong) di antara sesama manusia. Bagi seorang pembeli menolong seorang penjual yang perlu akan adanya uang (keuntungan), sedangkan bagi seorang penjual juga secara tidak langsung menolong dengan memberikan barangnya.<sup>65</sup> Prinsip tolong menolong ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah (5) Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Quran), h.

<sup>65</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op., Cit*, h. 89

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>66</sup>

Setiap akad yang dilakukan harus ada unsur sama-sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi.

e) Tidak ada unsur gharar

Bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Praktik jual beli *gharar* dalam masyarakat sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak oleh pelaku dalam melakukan kegiatan transaksi.<sup>67</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>68</sup>

<sup>66</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Quran), h.

<sup>67</sup>Adiwarman A. Karim, *Op., Cit*, h.33.

<sup>68</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Quran), h. 29



f) Pertanggungjawaban, yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu. Manusia di dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan. Pertanggungjawaban dalam masyarakat, tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul maal.<sup>69</sup>

d. Dampak penundaan pembayaran hutang

Agama Islam menekankan bahwasanya hutang itu adalah darurat. Tidak bermudah-mudah berhutang dan hal ini dilakukan ketika sangat dibutuhkan saja. Apabila seseorang tersebut sudah mampu untuk membayar hutangnya, maka bersegeralah untuk membayar hutang. Jika sengaja menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu adalah kedzaliman. Dampak yang ditimbulkan apabila menyalahi aturan kesepakatan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual, karena kesepakatan dalam pembayaran yang telah dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad berlangsung kemudian tiba-tiba pembeli melakukan penundaan pembayaran oleh Ppihak pembeli dengan alasan-alasan tertentu. Dampak yang didapat bagi pemilik dari penundaan pembayaran yaitu:

*Pertama*, adanya kerugian, dari penundaan pembayaran ini penjual merasa dirugikan karena waktu yang telah diluangkan untuk membuat

---

<sup>69</sup>Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulioa, 2005), hlm. 46-49.

pesanan yang di pesan oleh pembeli sehingga terhambatnya membuat barang pesanan yang lain.

*Kedua*, terhambatnya untuk membeli barang modal yang dibutuhkan dalam pembuatan etalase, penjual harus menunggu uang tersebut dan tidak dapat menerima modal dan keuntungan setelah barang itu selesai karena pembeli melakukan penundaan pembayaran.

Sangat besar dampaknya bagi pemesan yang melakukan penundaan pembayaran. Apabila menunda pembayaran hutang dan akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Berikut beberapa dampak penundaan pembayaran hutang yaitu:<sup>70</sup>

- a) Jika meninggal dan membawa hutang, ia akan terhalang masuk surga meskipun mati syahid.
- b) Keadaannya atau nasibnya menggantung/ tidak jelas atau tidak pasti apakah akan selamat atau binasa.
- c) Sahabat yang punya hutang tidak dishalati oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, padahal shalat beliau adalah syafaat
- d) Orang yang berhutang dan berniat tidak mau melunasi , akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri
- e) Status berhutang membuat pelakunya mendapatkan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami, bahwa dalam melakukan akad muamalah tidak lepas dari prinsip-prinsip hukum

---

<sup>70</sup><https://muslim.or.id/29942-bahaya-tidak-segera-membayar-hutang-padaahal-mampu.html>

Islam dan jual beli tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dampak yang akan diperoleh jika melakukan penundaan pembayaran akan merugikan diri sendiri serta orang lain. Segala sesuatu harus mengetahui akibat-akibat yang akan diperoleh oleh salah satu pihak. Adanya ancaman didunia maupun diakhirat. Prinsip-prinsip muamalah harus di harus dapat diterapkan dalam melakukan jual beli antara penjual dan pembeli agar akad tersebut menjadi sah dalam hukum Islam.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Tri Yulianti (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran Hutang setelah Jatoh Tempo di Lembaga BMT Sepakat Pringsewu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Penundaan Pembayaran Hutang setelah Jatoh Tempo di Lembaga BMT Sepakat Pringsewu. Sedangkan dalam metode penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi .

Hasil dari penelitian ini bahwa praktek pembayaran hutang setelah jatuh tempo menjadi permasalahan pada saat ini, . sebab setiap kli orang yang ingin meminjam uang ditagih selalu meminta waktu untuk pembayarannya sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama bertindak tegas dengan memberikan SP 1 pada bulan ke-1 dengan tujuan agar tidak terjadi pemberian SP pada bulan-bulan berikutnya.

2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari Faria Ummi Kulsum (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh di CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Banyumas”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penundaan pembayaran Upah Buruh di CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
3. Penelitian yang selanjutnya berhasil ditemukan adalah penelitian Ummu Kalsum (2014) yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Penundaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Musyarakah oleh Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Tujuan dari penelitian ini adalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

positif berlaku. Pada analisis bahan hukum, skripsi ini menggunakan metode deduksi, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadapi objek yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini mencakup pengertian dan pengaturan bank syariah, produk bank syariah, pengertian nasabah, pengertian dan macammacam pembiayaan musyarakah, serta dasar hukum, rukun dan syarat-syarat pembiayaan musyarakah.

Adapun hasil penelitian ini menurut hukum Islam adalah praktik penundaan pembayaran upah yang terjadi di CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Tetapi, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktik penundaan pembayaran upah yang terjadi di CV. Bangkit Jaya tidak bertentangan karena sebab faktor dari luar yang menyebabkan pemilik pabrik melakukan penundaan pembayaran upah.

Dengan demikian, dari beberapa skripsi diatas memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang penundaan pembayaran. Meskipun telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tinjauan hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran pada

sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* di Toko Cahaya Aluminium  
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara





### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Objek**

###### **1. Sejarah berdirinya dan perkembangan pada Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara**

Toko Cahaya Aluminium adalah toko usaha sendiri yang dibangun oleh bapak Yanto dan Ibu Narti. Toko aluminium ini sudah di kerjakan sejak 2011, berawal dari membuka usaha Sumur Bor akan tetapi usaha tersebut tidak terlalu berjalan mulus, lalu bapak Yanto melihat temannya membuka Toko Aluminium, dan ia mempunyai inisiatif untuk membuka usaha Aluminium yang menjual lemari kaca, lemari hias dan lain- lain. Awalnya bapak Yanto membuka usaha ini di jalan Kapten Mustafa Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupatn Lampung Utara. Akan tetapi, toko milik bapak Yanto sepi pengunjung dikarenakan tempatnya yang tidak strategis, Pak Yanto akhirnya berpindah kejalan Soekarno Hatta dan menyewa tempat atau ruko yang cukup strategis dekat dengan jalan raya dan ramai. bapak Yanto tertarik untuk melanjutkan usaha Aluminium dan menekuni usaha tersebut.

Berawal dari membuka usaha dengan barang atau modal seadanya dengan memesan kaca dan bahan lainnya sesuai dengan permintaan pembeli, dan memiliki karyawan hanya berjumlah 3 orang termasuk Bapak Yanto sendiri. Semakin bertambah pelanggan yang mengetahui pembuatan etalase bapak Yanto dan banyak pesanan yang di pesan oleh

pembeli, bapak Yanto menambahkan modal lebih besar dan menambah pegawai untuk membuat barang –barang tersebut.

Kegiatan transaksi jual beli ini berjalan sangat lancar, bapak Yanto sudah mempunyai banyak pelanggan dan bertambahnya barang pesanan yang dibuat. Seiring berjalannya waktu, Toko bapak Yanto tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ketahun. Toko Aluminium tersebut dinamai oleh bapak Yanto Toko Cahaya Aluminium. Dan sudah banyak diketahui oleh masyarakat.

Meningkatnya perkembangan usaha di bidang Aluminium yaitu membuat barang etalase, bapak Yanto menambah karyawan untuk membuat etalase, jadi saat ini total seluruh karyawan bapak Yanto berjumlah 9 orang yang terdiri dari 6 orang sebagai pengrajin/ pembuat barang dan 3 orang melakukan tahap finishing dan pengantar barang. Semakin banyak pula pesanan yang harus dibuat dan dipesan terlebih dahulu bapak Yanto menargetkan karyawannya membuat selama seminggu dalam waktu pembuatan barang etalase tersebut. pembayaran dilakukan dengan sistem berbagai macam seperti, membayar uang muka terlebih dahulu, kredit dan lunas.

Bapak Yanto sendiri mendapatkan pesanan kurang lebih berjumlah 5 pesanan dalam sehari.<sup>1</sup> Dari pesanan tersebut berbeda-beda dalam pemesanannya seperti pesanan lemari kaca, lemari hias, etalase dan lainnya. Modal yang dikeluarkan bapak Yanto dalam seminggu berjumlah

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan ibu Narti, pemilik Toko Cahaya Aluminium, kotabumi selatan lampung utara, tanggal 28 maret 2019

4 juta dalam seminggu. Omset yang didapat bapak Yanto dalam seminggu keuntungan bisa mencapai 6 juta perminggu bahkan bisa lebih jika orderan semakin bertambah. Produk yang dijual berbagai macam mulai dari keperluan rumah tangga ataupun untuk berdagang. Salah satunya produk yang dijual bapak Yanto yaitu :

1. Lemari pakaian : 2 pintu : 1.200.000

3 pintu : 1.800.000

2. Lemari Hias : 2 pintu : 1.500.000

3 pintu : 2.000.000

3. Lemari Piring : 2 pintu : 1.100.000

3 pintu : 1.800.000

4. Etalase Dagang : 2 pintu : 600.000

: 3 pintu : 2.000.000

#### 1. Letak Toko cahaya aluminium

Letak Toko Cahaya Aluminium berda dijalan Soekarno Hatta Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Toko Cahaya Aluminium berada di tengah pertokoan dan perkantoran serta di tengah kerumunan masyarakat dan di tepi jalan raya,

Bangunan Toko Cahaya Aluminium dibangun di atas tanah sewa dan luas bangunan kurang lebih dari 6x10m<sup>2</sup>. Dan lokasinya bersampingan dengan toko lainnya. Toko Cahaya Aluminium ini tidak hanya ramai dengan masyarakat tetapi juga berdekatan dengan beberapa kantor bank yaitu bank EKA dan bank BNI serta berdekatan

dengan kantor Pengadilan Agama Kotabumi. Sehingga cukup strategis dan sudah tidak asing lagi untuk masyarakat.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1) Sistem Pembayaran pada Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Dalam melakukan transaksi untuk pembayaran barang yang dijual tersebut maka ini sering dikenal sebagai "*term of payment*". Terdapat tiga pembayaran yang secara umum terdapat resiko dan stabilitas yang berbeda antara pembeli dan penjual, yakni:<sup>2</sup>

- a. Pembayaran dimuka yaitu pembeli membayar kepada penjual sebelum membawa barang tersebut yang diperoleh dibeli dari penjual. Sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu dilanjutkan oleh para pihak, maka uang pembayaran tersebut termasuk kedalam harga pembayaran.
- b. *Documentary collection* adalah sama dengan metode cash on delivery/ COD yang berarti lunas pada saat barang diserahkan.
- c. *Open account* adalah penjual dan pembeli sepakat bahwa barang dikirim terlebih dahulu dan dibayar setelah barang dikirim. Pemesan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu untuk dibuatkan, pemesan dan penjual sepakat bahwa pembayaran akan dilunasi apabila barang sudah dikirim kepada pemesan.

Pada Toko Cahaya Aluminium cara yang dilakukan dalam pembayaran yaitu dengan pembayaran dimuka yaitu pembeli membayar

---

<sup>2</sup>Edward G. Hinkelman, *Metode Pembayaran Bisnis*, Jakarta, PPM, 2002, h. 13-14

kepada penjual sebelum membawa barang, *Documentary collection* yakni lunas pada saat barang diserahkan, *Open account* yakni penjual dan pembeli sepakat barang dikirim terlebih dahulu dan dibayar setelah barang dikirim. Selain itu, Toko Cahaya Alumium ini juga melakukan cara pembayaran dengan kredit yaitu uang dicicil dibayar setiap bulannya sampai lunas. Dalam penerapan sistemnya Toko Cahaya Aluminium, banyak pemesan yang menggunakan sistem pesanan membayar uang muka terlebih dahulu dan akan dilunasi saat barang sudah selesai dibuat.

## **2. Pelaksanaan Penundaan Pembayaran pada Jual Beli Pesanan Antara Penjual dan Pemesan pada Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara**

Jual beli pesanan merupakan kontrak/ kesepakatan penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam hal ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. penjual lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat menurut spesifikasi yang telah disepakati bersama kepada pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atsa harga serta sistem pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan atau di tangguhkan sampai barang tersebut selesai dibuatkan. Dari pihak karyawan menambahkan bahwa dalam kesepakatan atau perjanjian tersebut tidak terdapat unsur paksaan semua dilakukan dengan kesadaran diri, transaksi pembayaran antara penjual dan pembeli dilakukan atas dasar kesepakatan bersama<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Ardi, karyawan toko cahaya aluminium tanggal 28 maret 2019

Toko Cahaya Aluminium merupakan tempat usaha dibidang pembuatan etalase yang menggunakan konsep pesanan (*istishna'*). Pelaksanaan dalam melakukan pesanan di Toko Cahaya Aluminium tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, pembeli memesan terlebih dahulu barang yang ingin dibuat, lalu penjual membuat barang tersebut sesuai keinginan pembeli.

Pelaksanaan yang dilakukan pembeli dan penjual di Toko Cahaya Aluminium dalam penundaan pembayaran, yaitu pemesan barang melakukan penundaan dalam membayar barang yang sudah selesai dilaksanakan dan melanggar kesepakatan bersama dengan penjual. Sehingga penjual merasa dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut.

Pihak pembeli memesan barang yang ingin dibuat, lalu disepakati bersama dengan penjual, setelah keduanya sepakat dengan barang tersebut tahap selanjutnya pihak penjual melakukan kesepakatan dalam menetapkan harga barang dengan pemesan, setelah dilakukan penetapan harga maka pihak penjual melalui orang lain membuat barang tersebut dalam waktu seminggu sesuai dengan kesulitan dalam membuat barang tersebut. Pembeli membayar uang muka sebagai jaminan untuk barang yang dipesan dan akan dilunasi ketika barang sudah selesai dibuat, selanjutnya setelah barang telah selesai dibuat oleh pengrajin, barang akan diantar kepada pembeli, akan tetapi pihak pemesan belum bisa melunasi barang tersebut dengan kesepakatan diawal dan melakukan penundaan



pembayaran.<sup>4</sup> Alasan pembeli belum melunasi barang tersebut, karena ia ada kebutuhan mendesak yang harus dilunasi sehingga barang tersebut harus ditunda terlebih dahulu pembayarannya. Pihak penjual memberikan ketenggangan waktu dalam penundaan pembayaran yaitu seminggu sejak barang itu sudah selesai dibuat, sehingga pihak penjual harus menunggu untuk barang tersebut dilunasi oleh pembeli.<sup>5</sup>

Berdasarkan terjadinya transaksi jual beli pesanan pada Toko Cahaya Aluminium pihak pembeli dan pihak toko, dalam penundaan pembayaran tersebut terkadang tidak dapat dihindari apabila timbulnya suatu permasalahan dalam pembayaran di antara kedua belah pihak yang telah melakukan transaksi. Dalam pelaksanaan yang ada di Toko Cahaya Aluminium tidak berjalan dengan apa yang diinginkan yang dimana pihak pembeli melakukan penundaan pembayaran dengan alasan kebutuhan yang mendesak.<sup>6</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh pembeli dalam hal ini tentunya telah membohongi pihak penjual karena merasa dikecewakan atas kesepakatan yang dilakukan bersama sejak awal memesan. alasan yang diberikan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pembeli tersebut, seperti pembeli menunda pembayaran dalam transaksi jual beli pesanan barang tersebut dan membayar setelah pembeli sudah mempunyai uang.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Hendra, karyawan toko cahaya aluminium tanggal 28 maret 2019

<sup>5</sup>Wawancara dengan ibu Narti, pemilik Toko Cahaya Aluminium, kotabumi tanggal 28 maret 2019

<sup>6</sup>Wawancara dengan puji, karyawan toko cahaya aluminium tanggal 28 maret 2019

### 3. Dampak Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Dalam sebuah pembayaran banyak hal-hal yang terjadi tanpa terduga oleh pihak yang melaksanakan transaksi, sehingga dapat berdampak pada keuntungan ataupun kerugian terhadap transaksi yang dilaksanakan.

Dampak yang ditimbulkan apabila menyalahi aturan kesepakatan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual, karena kesepakatan dalam pembayaran yang telah dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad berlangsung kemudian tiba-tiba pembeli melakukan penundaan pembayaran oleh pihak pembeli dengan alasan-alasan tertentu. Dampak yang didapat dari penundaan pembayaran oleh pemesan di Toko Cahaya Aluminium, yaitu:

*Pertama*, adanya kerugian, dari penundaan pembayaran ini penjual merasa dirugikan karena waktu yang telah diluangkan untuk membuat pesanan yang di pesan oleh pembeli sehingga terhambatnya membuat barang pesanan yang lain.

*Kedua*, terhambatnya untuk membeli barang modal yang dibutuhkan dalam pembuatan etalase, penjual harus menunggu uang tersebut dan tidak dapat menerima modal dan keuntungan setelah barang itu selesai karena pembeli melakukan penundaan pembayaran.

Namun dengan adanya dampak yang ditimbulkan oleh pembeli tidak, sesuai dengan wawancara terhadap responden hal itu tidak jadi

kendala untuk melakukan jual beli dengan sistem uang muka tersebut. karena sebelumnya pihak penjual sudah mengetahui dampak-dampak penundaan pembayaran yang akan terjadi. Apabila para penjual tetap melakukan jual beli tersebut berarti mereka sudah siap akan resiko yang akan terjadi dalam penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pemesan selanjutnya.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup>Wawancara dengan ibu Narti, pemilik Toko Cahaya Aluminium, kotabumi selatan lampung utara, tanggal 28 maret 2019

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Analisis Praktek Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara**

Setelah mengumpulkan data, baik yang didapat dari perpustakaan maupun dari lapangan yang kemudian sudah dituangkan dalam penyusunan pada bab-bab terdahulu, maka pada selanjutnya bab ini sebagai langkah akan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Jual beli pesanan yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium antara pemebli dan penjual merupakan sistem jual beli yang dilakukan secara pemesanan terlebih dahulu dan dilakukan oleh orang-orang (penjual dan pembeli) yang sudah dewasa. Transaksi jual beli ini diawali oleh pemesan yang mendatangi toko untuk memesan barang dan memilih desain yang ingin dibuat.

Setiap perjanjian yang telah disepakati merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual beli haruslah memuat hak dan kewajiban para pihak serta perjanjian tersebut haruslah tertuang dalam sebuah surat yang telah disetujui kedua pihak. Perjanjian jual beli pesanan di Toko Cahaya Aluminium yang dilakukan antara penjual di Toko Cahaya Aluminium dengan pemesan barang, masih banyak hal-hal yang tidak memenuhi akad bersama. Diantaranya disebutkan bahwa waktu pembayaran antara pihak pembuat dan pemesan harus sesuai yang telah disepakati, tetapi dalam hal ini pemesan melakukan penundaan

pembayaran dan merugikan pihak penjual. Sehingga harus merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam, penjual dan pembeli harus sama-sama adil dalam bertransaksi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam Qur'an dijelaskan dalam surah An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Dalam pelaksanaannya, pembeli mendatangi pihak penjual untuk memesan agar dibuatkan pesanan barang etalase. Setelah itu, pembeli menetapkan barang yang akan dibuat. Penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dalam menetapkan transaksi pembayaran yang diinginkan salah satu membayar uang muka terlebih dahulu dan pembeli diwajibkan akan melunasi ketika barang sudah selesai. Setelah melakukan kesepakatan ini dan barang sudah selesai dibuat, pembeli melakukan penundaan pembayaran terhadap barang yang dipesan padahal barang tersebut sudah selesai, hal ini tentu saja melanggar akad pesanan yaitu kesepakatan bersama. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan mendesak dari pihak pembeli sehingga harus menunda pembayaran dan

menyebabkan terhambatnya penjual untuk membeli barang modal. Selang beberapa minggu pihak pembeli melunasi barang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini. Maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya dalam jual beli pesanan antara penjual dan pembeli, diperkenankan oleh syara' apabila dalam melakukan transaksi dan akadnya tidak bertentangan dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dijelaskan dalam kaidah fiqh adalah:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّحْرِيمُ وَالْبَطْلُ إِلَّا مَا جَاءَ بِهِ الدَّلِيلُ عَلَى أَوَامِرِهِ

“Hukum asal dalam beribadah adalah haram dan batal kecuali yang ada dalil yang memerintahkan”

Seperti yang dilakukan pihak pemesanya itu melakukan penundaan pembayaran, di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara pemesan menunda pembayaran. Hal tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan akad muamalah yang disepakati oleh penjual dan pembeli. kesepakatan awal secara tertulis bahwa pemesan melunasi setelah barang telah selesai dibuat. Sehingga pihak penjual harus dirugikan oleh pemesan. Akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*) bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad. Dari penundaan pembayaran ini penjual merasa dirugikan oleh pemesan, sehingga penjual harus tertunda untuk membeli barang modal yang akan dibuat.

## 2. Analisis Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum yang di dasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku. Hukum Islam dikembangkan dengan sangat menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal.

Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum- hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam, hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pandangan manusia, baik secara individu maupun masyarakat luas. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat menjadikan hukum Islam. Cara pandang sendiri memenuhi sejumlah persyaratan tertentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai suatu tradisi hukum. Bagi masyarakat muslim yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian, persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif. Contohnya hal yang terjadi yaitu penundaan pembayaran pada jual beli *istishna'* yang ada di Kotabumi Lampung Utara pada Toko Cahaya Aluminium.

Dalam hukum Islam penundaan pembayaran sangatlah dilarang, karena hal tersebut dapat dianggap merugikan pihak lain yang melakukan kesepakatan. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 1, yaitu :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi adalah dua pihak yang secara langsung melaksanakan sebuah transaksi yaitu antara penjual dan pembeli . Agar akad atau transaksi itu sah maka pihak yang mengadakan transaksi haruslah orang yang mempunyai kapasitas untuk melakukan transaksi dalam sudut pandang fiqh.

Kapasitas untuk mengadakan transaksi tersebut menurut sudut pandangan fiqh yaitu orang yang memenuhi kriteria yaitu tidak dipaksa. Oleh karena itu transaksi yang diadakan oleh penjual dan pembeli yang dalam kondisi dipaksa itu tidak sah dalam akad muamalah kecuali jika pemaksaan yang dilakukan dalam hal ini memang bisa dibenarkan secara hukum syariat. Contohnya adalah penghutang yang menunda-nunda untuk melunasi hutangnya tanpa alasan sehingga menyebabkan kerugian untuk pihak lainnya

Apabila pembeli melanggar akad yang sudah disepakati maka ia telah melanggar perjanjian dengan Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam surah At-Taubat (9) ayat 75-77 :

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥)  
 فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ  
 إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٧٧)

Artinya:” Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh.” Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai da waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkirkan terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta”

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memenuhi akad, yaitu dengan sempurna dan tidak membatalkannya dan mengurangnya. Dan ini mencakup akad antara seorang hamba dengan tuhan-Nya berupa komitmen beribadah dan melaksanakannya dengan sempurna serta tidak mengurangi hak-haknya sedikitpun, antara seorang hamba dengan rasul-Nya dengan mentaati dan mengikutinya, dan antara dia dengan orang tua maupun kerabat dengan berbuat baik dan bersilaturahmi serta tidak memutuskan hubungan dengan mereka.

Dalam suatu akad menyebabkan masing pihak penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, pihak pembeli wajib untuk melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang, dan berhak untuk mendapatkan barang tersebut. Sesuai dengan kesepakatan antar

pihak dan pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang sudah dibayar dengan kesepakatan bersama, dan berhak mendapatkan uang dari pembeli.

Pembayaran jual beli *istishna'* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain pembayaran di muka, yaitu pembayaran yang dilakukan secara keseluruhan/ lunas pada saat akad sebelum pesanan yang dibuat diberikan oleh penjual kepada pihak pemesan. Pembayaran dilakukan secara penagguhan, yaitu pembayaran dilakukan setelah pesanan diserahkan oleh penjual kepada pemesan dan Pembayaran dilakukan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pemesan, yaitu pembayaran yang dilakukan pada saat barang sudah dikirim ke pemesan/ sudah sampai kepada pemesan akhir.

Dari beberapa hal yang dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa antara pihak penjual dan pemesan sudah membuat kesepakatan terkait dengan sistem pembayarannya, yaitu membayar DP atau uang muka terlebih dahulu dan untuk sisanya akan dibayar setelah pesanan yang dibuat selesai dikirim atau berdasarkan kesepakatan, kejujuran dan kepercayaan adalah salah satu hal yang harus dikaitkan antara kedua belah pihak. Apabila pihak pemesan memang benar-benar mampu untuk membayarnya dan tidak mempunyai kebutuhan mendesak maka itu tidak diperbolehkan seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مَطْلَ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا تُبِعَ أَحَدُكُمْ

عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ (رواه البخاري ومسلم)

*“Dari Abu Hurairah r.a bahwa dari Rasulullah SAW bersabda: penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adaah penganiyaan (zalim), dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya maka hendaklah ia menerimanya”. (Hadist Riwayat Abu Dawud)*

Menurut analisis dalam penundaan pembayaran ini tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan prinsip-prinsip muamalah yang bertentangan, Adapun Prinsip-Prinsip itu adalah :

1. Prinsip saling ridha diantara para pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini tidak adanya unsur *Tadlis* (penipuan) baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan. Tetapi dalam prakteknya penundaan pembayaran ini pembeli melakukan penipuan dalam pembayaran, pembeli tidak menepati kesepakatan yang sudah di laksanakan.
2. Prinsip kemaslahatan yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*) bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad. Dari penundaan pembayaran ini penjual merasa dirugikan oleh pemesan, sehingga penjual harus tertunda untuk membeli barang modal yang akan dibuat.

3. Adil merupakan norma yang paling utama dalam segala aspek perekonomian. Berbeda dengan adil kebalikannya adalah zalim. Penjual sudah memberikan hak-hak pembeli yaitu dengan membuat barang sesuai dengan permintaan pemesan. Akan tetapi, pemesan melakukan tindakan ketidakadilan atau dzalim kepada penjual dengan menunda pembayaran, sehingga tidak terpenuhinya akad-akad yang sudah disepakati
4. Tolong menolong. Bagi seorang pembeli menolong seorang penjual yang perlu akan adanya uang (keuntungan), Setiap akad yang dilakukan harus ada unsur sama-sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi. Penjual mendapatkan keuntungan dari pemesan. Prinsip tolong menolong ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah (5) Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :” Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Akan tetapi dalam penundaan pembayaran, penjual harus menunggu keuntungan yang ia dapatkan dari pemesan dalam waktu yang cukup lama yaitu seminggu.

5. Bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya *gharar* yaitu tipu daya. Salah satu pihak dari penundaan pembayaran merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:” Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas dapat diketahui bahwa dalam salah satu prinsip tersebut harus diterapkan dalam melakukan transaksi pembayaran dalam jual beli pesanan. Segala unsur yang dapat merugikan salah satu pihak adalah larangan untuk dilakukan karena bertentangan dengan Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penundaan pembayaran dalam jual beli pesanan yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip diatas, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pembeli dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapatkan keuntungan yang ia dapat dari pembeli. Adanya penundaan dari pihak konsumen menimbulkan kerugian bagi pemilik

usaha Toko Cahaya Aluminium, dalam penundaan pembayaran ini bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

## B. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dan penjual, dan melanggar akad yang sudah dilakukan secara tertulis yaitu pemesan melakukan penundaan pembayaran pada saat waktu pembayaran yang telah ditentukan. Dalam sistem pesanan pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan transaksi untuk pembayaran barang yang dijual melakukan sistem pembayaran dimuka yaitu pembeli membayar kepada penjual sebelum membawa barang, documentary collection yaitu lunas pada saat barang diserahkan, pembayaran dengan cara dicicil dibayar setiap bulannya sampai lunas.

Pelaksanaan penundaan pembayaran yang dilakukan pemesan dan penjual yaitu pemesan barang melakukan penundaan dalam membayar barang yang sudah selesai dibuat. Sehingga dalam hal ini tentunya telah membohongi penjual karena merasa dikecewakan dan di rugikan dalam transaksi jual beli dan tersebut. Dampak dari penundaan pembayaran penjual harus menunda membeli barang modal dan harus menunggu sampai barang tersebut dilunasi. Dalam tinjauan hukum Islam, penundaan pembayaran ini tidak sesuai dengan



prinsip-prinsip muamalah. Segala sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan adalah larangan bagi hukum Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasannya ini, setelah dianalisis maka penelitian ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penundaan pembayaran di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara pemesan menunda pembayaran. Hal tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan akad muamalah yang disepakati oleh penjual dan pembeli. kesepakatan awal secara tertulis bahwa pemesan melunasi setelah barang telah selesai dibuat. Namun pihak pemesan melakukan penundaan pembayaran, Sehingga pihak penjual harus dirugikan oleh pemesan, penjual harus tertunda untuk membeli barang modal yang akan dibuat.
2. Dalam pelaksanaan penundaan pembayaran, di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pembeli dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapatkan keuntungan yang ia dapat dari pembeli. Adanya penundaan dari pihak konsumen menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha Toko Cahaya Aluminium, dalam penundaan pembayaran ini bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

## B. Rekomendasi

1. Kepada pihak penjual dan pemesan untuk selalu mendahului kejujuran, karena apapun yang diperoleh dengan adanya kejujuran akan mendapatkan keberkahan dan bermanfaat.
2. Para pihak harus lebih memperhatikan tingkah laku dalam melakukan transaksi, dan etika dalam jual beli pesanan sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan hak-haknya.
3. Meskipun masalah tidak dapat kita perkirakan sebelumnya, namun sebelumnya kedua belah pihak harus saling mengantisipasi. Sehingga tidak ada yang dikecewakan dan dapat memenuhi kesepakatan yang sudah di sepakati bersama.
4. Perlu adanya pengetahuan hukum Islam, sehingga masyarakat dapat mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam jual beli.

